

Matriks

Rancangan Surat Edaran OJK Tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
I. KETENTUAN UMUM		
1	Dalam rangka mencapai tujuan usaha yang berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, BPR perlu menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, prinsip kehati-hatian, dan asas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis harus disusun secara matang, realistis dan komprehensif, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk mencapai visi dan misi BPR.	
2	Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan usaha BPR dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan.	
3	Rencana Bisnis yang disusun oleh BPR sebagaimana dimaksud pada angka 2. mencakup rencana dalam jangka pendek, jangka menengah, dan/atau rencana strategis pengembangan jangka panjang. Rencana dalam jangka pendek adalah rencana kegiatan usaha BPR dalam periode 1 (satu) tahun. Rencana dalam jangka menengah adalah rencana kegiatan usaha BPR dalam periode 3 (tiga) tahun. Strategi pengembangan jangka panjang adalah rencana kegiatan usaha BPR dalam periode 5 (lima) tahun, dengan cakupan antara lain berupa arah	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	kebijakan pengembangan dan penguatan permodalan bagi BPR.	
4	Dengan mempertimbangkan perbedaan kapasitas permodalan yang mempengaruhi kompleksitas kegiatan usaha dan batasan wilayah jaringan kantor BPR, jangka waktu proyeksi dan perencanaan beberapa cakupan materi dalam penyusunan Rencana Bisnis BPR dibedakan berdasarkan modal inti, yaitu BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Perbedaan tersebut ditujukan agar setiap BPR dapat berkembang dan berkontribusi optimal menurut kelompok permodalannya.	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU
II. CAKUPAN DAN PENYUSUNAN RENCANA BISNIS		
	Sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor...../POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Rencana Bisnis BPR paling sedikit mencakup ringkasan eksekutif, strategi bisnis dan kebijakan, proyeksi laporan keuangan, target rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya, rencana penghimpunan dana, rencana penyaluran dana, rencana permodalan, rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan sumber daya manusia (SDM), rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru, rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, dan informasi lainnya.	
1	<p>Ringkasan Eksekutif</p> <p>Ringkasan eksekutif paling sedikit meliputi rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR, indikator keuangan utama, dan target jangka pendek dan jangka menengah, sebagai berikut:</p> <p>a. Rencana dan langkah-langkah strategis</p> <p>Rencana dan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh BPR</p>	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p>dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan strategi pengembangan jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana strategi jangka panjang hanya disampaikan apabila terdapat perubahan.</p> <p>b. Indikator Keuangan Utama</p> <p>Indikator keuangan utama paling sedikit meliputi kinerja BPR dan proyeksi dari faktor permodalan, rentabilitas, kualitas aset, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) harus menyampaikan kinerja BPR posisi akhir bulan <u>September</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi jangka pendek dari faktor permodalan, rentabilitas, kualitas aset, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR. Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis BPR tahun 2017 untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai berikut: 	<p>Usulan Poin b No. 1 sesuai dengan usulan pada RPOJK BPR dan BPRS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) harus menyampaikan kinerja BPR posisi akhir bulan <u>Oktober</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi jangka pendek dari faktor permodalan, rentabilitas, kualitas aset, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR. Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis BPR tahun 2017 untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai berikut:

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
------	-------------------	-------------------

Indikator	Aktual Sep 2016	Proyeksi		
		Des 2016	Tahun 2017	
			Jun	Des
Rasio KPMM (%)				
Rasio Modal Inti terhadap ATMR (%)				
Rasio <i>Return On Assets</i> (%)				
<i>Net Interest Margin</i> (%)				
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)				
Rasio Aset Produktif yang Diklasifikasikan terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk (%)				
Rasio PPAP terhadap Aset Produktif (%)				
Rasio NPL (%)				
a. <i>Gross</i>				
b. <i>Netto</i>				
<i>Cash Ratio</i> (%)				
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (%)				
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif (%)				
Rasio Kredit Produktif (UMKM) terhadap Total Kredit (%)				

2) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan kinerja BPR posisi akhir bulan September pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi jangka menengah dari faktor permodalan, rentabilitas, kualitas aset, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR. Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis BPR tahun 2017 untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai berikut:

2) BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan kinerja BPR posisi akhir bulan Oktober pada tahun penyusunan Rencana Bisnis dan proyeksi jangka menengah dari faktor permodalan, rentabilitas, kualitas aset, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR. Contoh tabel indikator keuangan utama Rencana Bisnis BPR tahun 2017 untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai berikut:

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
------	-------------------	-------------------

Indikator	Aktual Sep 2016	Proyeksi				
		Des 2016	Tahun 2017		Des 2018	Des 2019
			Jun	Des		
Rasio KPMM (%)						
Rasio Modal Inti terhadap ATMR (%)						
Rasio <i>Return On Assets</i> (%)						
<i>Net Interest Margin</i> (%)						
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (%)						
Rasio Aset Produktif yang Diklasifikasikan terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk (%)						
Rasio PPAP terhadap Aset Produktif (%)						
Rasio NPL (%)						
a. <i>Gross</i>						
b. <i>Netto</i>						
<i>Cash Ratio</i> (%)						
<i>Loan to Deposit Ratio</i> (%)						
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif (%)						
Rasio Kredit Produktif (UMKM) terhadap Total Kredit (%)						

c. Target jangka pendek dan jangka menengah

Target jangka pendek adalah target kegiatan usaha BPR selama 1 (satu) tahun ke depan, antara lain mencakup penurunan tingkat *Non Performing Loan* (NPL), peningkatan fungsi intermediasi, dan peningkatan efisiensi.

Target jangka menengah bagi BPR adalah target kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun ke depan, antara lain mencakup upaya penguatan permodalan, serta penerapan tata kelola dan manajemen risiko BPR yang mengacu pada ketentuan mengenai tata kelola dan manajemen risiko bagi BPR.

Ringkasan Eksekutif ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 1.

Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
2	<p>Strategi Bisnis dan Kebijakan</p> <p>Bagian ini berisi penjelasan mengenai strategi bisnis dan kebijakan yang paling kurang memuat visi dan misi BPR, arah kebijakan BPR, kebijakan tata kelola dan manajemen risiko, analisis posisi BPR dalam kelompok usaha yang sama berdasarkan aset, dan/atau lokasi, realisasi pemberian kredit atau pembiayaan kepada debitur menurut jenis usaha yang mencakup usaha mikro, kecil dan menengah, dan strategi pengembangan bisnis, sebagai berikut:</p> <p>a. Visi dan misi BPR Visi adalah tujuan yang ingin dicapai BPR dalam jangka menengah atau jangka panjang. Misi adalah pernyataan yang digunakan untuk menggambarkan tujuan dari BPR. Visi dan Misi BPR disusun dan disampaikan oleh BPR setiap periode 5 tahun sekali sepanjang tidak terdapat perubahan.</p> <p>b. Arah kebijakan BPR Arah kebijakan BPR dijelaskan dalam jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun, jangka menengah untuk periode 3 (tiga) tahun, dan rencana strategi pengembangan jangka panjang untuk periode 5 (lima) tahun mencakup informasi umum kebijakan BPR yang ditetapkan oleh manajemen dalam pengembangan usaha BPR di waktu yang akan datang.</p> <p>c. Kebijakan tata kelola dan manajemen risiko Uraian mengenai kebijakan tata kelola dan manajemen risiko BPR meliputi informasi mengenai langkah-langkah dalam menerapkan manajemen risiko dan kebijakan dalam melaksanakan tata kelola,</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p>termasuk kebijakan remunerasi yang mencakup pemberian gaji, bonus dan fasilitas lain.</p> <p>d. Analisis posisi BPR dalam kelompok usaha yang sama berdasarkan aset, dan/atau lokasi Dalam analisis posisi dijelaskan pula permasalahan dan hambatan BPR dalam menghadapi persaingan dengan BPR lain dalam kelompok usaha yang sama.</p> <p>e. Realisasi pemberian kredit kepada debitur menurut jenis usaha yang mencakup usaha mikro, kecil dan menengah Realisasi pemberian kredit dikelompokkan menurut jenis usaha mikro, kecil dan menengah yang mengacu pada kriteria usaha berdasarkan Undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>f. Strategi pengembangan bisnis Uraian mengenai strategi pengembangan bisnis antara lain memuat informasi langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan usaha BPR yang telah ditetapkan, termasuk penjelasan mengenai strategi pengembangan organisasi dan teknologi informasi, dan strategi untuk mengantisipasi perubahan kondisi eksternal.</p> <p>Strategi Bisnis dan Kebijakan ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 2.</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>
3	<p>Proyeksi Laporan Keuangan</p> <p>Proyeksi laporan keuangan paling kurang meliputi proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi yang mencakup informasi mengenai kondisi dan proyeksi keuangan BPR, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target dalam penyusunan proyeksi, sebagai berikut:</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p>a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Proyeksi keuangan yang dijelaskan untuk posisi aktual pada akhir <u>bulan September</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR, proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR, dan proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran. Proyeksi laporan keuangan ini disajikan dengan mengacu pada:</p> <p>1) Lampiran 3(a) : Proyeksi Neraca 2) Lampiran 4(a) : Proyeksi Laba Rugi</p> <p>b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Proyeksi keuangan yang dijelaskan untuk posisi aktual pada akhir bulan <u>September</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR, proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR, proyeksi 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan. Proyeksi laporan keuangan ini disajikan dengan mengacu pada:</p> <p>1) Lampiran 3(b) : Proyeksi Neraca 2) Lampiran 4(b) : Proyeksi Laba Rugi</p>	<p>a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Proyeksi keuangan yang dijelaskan untuk posisi aktual pada akhir <u>bulan Oktober</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR, proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR, dan proyeksi 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran. Proyeksi laporan keuangan ini disajikan dengan mengacu pada:</p> <p>1) Lampiran 3(a) : Proyeksi Neraca 2) Lampiran 4(a) : Proyeksi Laba Rugi</p> <p>b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) Proyeksi keuangan yang dijelaskan untuk posisi aktual pada akhir bulan <u>Oktober</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR, proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR, proyeksi 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan proyeksi akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan. Proyeksi laporan keuangan ini disajikan dengan mengacu pada:</p> <p>1) Lampiran 3(b) : Proyeksi Neraca 2) Lampiran 4(b) : Proyeksi Laba Rugi</p> <p>(Selain itu, usulan kami Pos – pos Neraca dan Laba</p>

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
		Rugi semuanya mengacu pada format laporan publikasi BPR dan BPRS)
4	<p>Target Rasio-Rasio dan Pos-Pos tertentu Lainnya</p> <p>Target rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya paling kurang meliputi target rasio keuangan pokok dan target pos-pos tertentu lainnya, serta alasan atau pertimbangan mengenai penetapan target.</p> <p>Target rasio keuangan pokok meliputi rasio-rasio yang paling kurang dapat memberikan informasi untuk penilaian kondisi permodalan, kualitas aset, rentabilitas dan likuiditas yang mengacu pada ketentuan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan BPR.</p> <p>Target pos-pos tertentu lainnya meliputi target beberapa rasio terkait kredit atau pembiayaan kepada debitur usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, rasio realisasi dana pendidikan dan pelatihan terhadap dana yang dianggarkan, dan rasio agunan yang diambil alih terhadap total kredit.</p> <p>a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)</p> <p>Target rasio keuangan pokok yang disajikan untuk posisi aktual pada akhir bulan <u>September</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR, target akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR dan target 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.</p> <p>Target rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya disajikan dengan mengacu pada Lampiran 5(a).</p> <p>b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)</p> <p>Target pos-pos tertentu lainnya yang disajikan untuk posisi aktual pada akhir bulan <u>September</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR, target akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>a. BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)</p> <p>Target rasio keuangan pokok yang disajikan untuk posisi aktual pada akhir bulan <u>Oktober</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR, target akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR dan target 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran.</p> <p>Target rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya disajikan dengan mengacu pada Lampiran 5(a).</p> <p>b. BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)</p> <p>Target pos-pos tertentu lainnya yang disajikan</p>

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p>BPR, target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan target akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan. Target rasio-rasio dan pos-pos tertentu lainnya disajikan dengan mengacu pada Lampiran 5(b).</p>	<p>untuk posisi aktual pada akhir bulan <u>Oktober</u> pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR, target akhir bulan Desember pada tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR, target 1 (satu) tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, dan target akhir tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.</p>
5	<p>Rencana Penghimpunan Dana</p> <p>Rencana penghimpunan dana paling sedikit meliputi rencana penghimpunan dana pihak ketiga dan rencana pendanaan lainnya. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai target yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BPR untuk merealisasikan rencana tersebut.</p> <p>Rencana penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rencana penghimpunan tabungan dan deposito, serta informasi mengenai depasan dan penabung inti.</p> <p>Rencana pendanaan lainnya mencakup antara lain pinjaman dari bank lain dan/atau pinjaman lainnya termasuk <i>linkage program</i>.</p> <p>Rencana tersebut mencerminkan posisi penghimpunan dana posisi aktual (posisi akhir bulan <u>September</u> tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR) dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara semesteran.</p> <p>Informasi mengenai depasan inti merupakan informasi mengenai 25 (dua puluh lima) data depasan terbesar, sedangkan informasi mengenai penabung inti merupakan informasi mengenai 25 (dua puluh lima) data penabung terbesar. Dalam hal pada Laporan Bulanan BPR hanya terdapat data berdasarkan nomor rekening depasan dan data berdasarkan nomor rekening penabung, BPR dapat menggunakan data 25 (dua puluh lima) rekening deposito terbesar dan data 25 (dua puluh lima) rekening tabungan</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Rencana penghimpunan dana paling sedikit meliputi rencana penghimpunan dana pihak ketiga dan rencana pendanaan lainnya. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai target yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BPR untuk merealisasikan rencana tersebut.</p> <p>Rencana penghimpunan dana pihak ketiga meliputi rencana penghimpunan tabungan dan deposito, serta informasi mengenai depasan dan penabung inti.</p> <p>Rencana pendanaan lainnya mencakup antara lain pinjaman dari bank lain dan/atau pinjaman lainnya termasuk <i>linkage program</i>.</p> <p>Rencana tersebut mencerminkan posisi penghimpunan dana posisi aktual (posisi akhir bulan <u>Oktober</u> tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR) dan rencana penghimpunan dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara semesteran.</p> <p>Informasi mengenai depasan inti merupakan informasi mengenai 25 (dua puluh lima) data</p>

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p>terbesar untuk menyajikan informasi mengenai depasan inti dan penabung inti.</p> <p>Rencana penghimpunan dana disajikan dengan mengacu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lampiran 6 : Rencana Penghimpunan Dana Pihak Ketiga b. Lampiran 7 : Rencana Pendanaan Lainnya 	<p>depasan terbesar, sedangkan informasi mengenai penabung inti merupakan informasi mengenai 25 (dua puluh lima) data penabung terbesar. Dalam hal pada Laporan Bulanan BPR hanya terdapat data berdasarkan nomor rekening depasan dan data berdasarkan nomor rekening penabung, BPR dapat menggunakan data 25 (dua puluh lima) rekening deposito terbesar dan data 25 (dua puluh lima) rekening tabungan terbesar untuk menyajikan informasi mengenai depasan inti dan penabung inti.</p>
6	<p>Rencana Penyaluran Dana</p> <p>Rencana penyaluran dana paling sedikit meliputi:</p> <p>a. Rencana penyaluran kredit kepada pihak terkait Pihak terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit. Rencana penyaluran kredit kepada pihak terkait disajikan dengan mengacu pada <u>Lampiran 8(a)</u>.</p> <p>b. Rencana penempatan pada bank lain Bagi BPR penempatan pada bank lain dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) giro, deposito berjangka sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan/atau bank umum syariah; dan/atau 2) deposito berjangka, dan/atau tabungan pada BPR dan/atau BPRS. <p>Rencana penempatan pada bank lain disajikan dengan mengacu pada Lampiran 8(b).</p> <p>c. Rencana penyaluran kredit kepada debitur inti Debitur inti merupakan debitur individual atau debitur grup yang masuk</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Dalam Lampiran 8(a) yaitu rencana penyaluran kredit kepada pihak dan Lampiran 8 (c) Rencana penyaluran kredit kepada debitur inti, pada kolom tersebut diminta untuk menyebut nama debitur BPR. Jumlah pinjaman debitur dimasa akan datang, tentunya tidak bisa diprediksi. Sehingga kami mengusulkan hanya mencantumkan jumlah rekening dan nominalnya saja.</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p>dalam kategori 25 (dua puluh lima) debitur terbesar pada BPR di luar pihak terkait.</p> <p>Informasi mengenai debitur inti merupakan informasi mengenai 25 (dua puluh lima) data debitur terbesar. Dalam hal pada Laporan Bulanan BPR hanya terdapat data debitur berdasarkan nomor rekening, BPR dapat menggunakan data 25 (dua puluh lima) rekening kredit terbesar untuk menyajikan informasi mengenai debitur inti.</p> <p>Rencana penyaluran kredit kepada debitur inti disajikan dengan mengacu pada <u>Lampiran 8(c)</u>.</p> <p>d. Rencana penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam pemberian kredit</p> <p>Rencana penyaluran kredit disajikan berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam pemberian kredit BPR. Sektor eknomi tersebut adalah 5 (lima) sektor ekonomi dengan persentase pemberian kredit terbesar dari total portofolio penyaluran kredit BPR. Rincian sektor ekonomi adalah sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR.</p> <p>Rencana penyaluran kredit berdasarkan sektor ekonomi yang menjadi prioritas dalam pemberian kredit disajikan dengan mengacu pada Lampiran 8(d).</p> <p>e. Rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan</p> <p>Rencana penyaluran kredit disajikan berdasarkan jenis penggunaan yang meliputi kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan BPR.</p> <p>Rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis penggunaan disajikan dengan mengacu pada Lampiran 8(e).</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p>f. Rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha debitur yang mencakup usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Pengelompokan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah mengacu kepada kriteria usaha berdasarkan Undang-undang mengenai usaha mikro, kecil dan menengah. Rencana penyaluran kredit berdasarkan jenis usaha debitur yang mencakup usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah disajikan dengan mengacu pada Lampiran 8(f).</p> <p>Rencana tersebut mencerminkan posisi penyaluran dana untuk posisi aktual (posisi akhir bulan <u>September</u> tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR) dan rencana penyaluran dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara semesteran. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BPR untuk merealisasikan rencana tersebut.</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Rencana tersebut mencerminkan posisi penyaluran dana untuk posisi aktual (posisi akhir bulan <u>Oktober</u> tahun penyusunan Rencana Bisnis BPR) dan rencana penyaluran dana untuk periode 1 (satu) tahun ke depan secara semesteran. Dalam bagian ini diuraikan juga mengenai alasan atau pertimbangan yang digunakan dalam menyusun rencana dimaksud serta strategi BPR untuk merealisasikan rencana tersebut.</p>
7	<p>Rencana Permodalan</p> <p>Rencana permodalan paling kurang meliputi proyeksi Pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan rasio modal inti minimum, rencana pemenuhan modal inti minimum, dan rencana perubahan modal, sebagai berikut:</p> <p>a. Proyeksi Pemenuhan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan Rasio Modal Inti Minimum Proyeksi KPM paling kurang meliputi proyeksi modal, proyeksi Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan proyeksi rasio KPM yang dijelaskan untuk posisi aktual (akhir bulan <u>September</u> penyusunan RBB),</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>a. Proyeksi Pemenuhan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan Rasio Modal Inti Minimum Proyeksi KPM paling kurang meliputi proyeksi modal, proyeksi Aset Tertimbang Menurut Risiko</p>

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p>proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan RBB, proyeksi 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran dan proyeksi tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.</p> <p>Proyeksi pemenuhan rasio KPMM dan rasio modal inti minimum mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPRS.</p> <p>Proyeksi pemenuhan KPMM ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 9(a).</p> <p>b. Rencana Pemenuhan Modal Inti Minimum</p> <p>Rencana pemenuhan modal inti minimum ditujukan bagi BPR yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.</p> <p>Rencana pemenuhan modal inti minimum tersebut disajikan untuk posisi aktual (akhir bulan <u>September</u> penyusunan RBB), proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan RBB, proyeksi 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, serta proyeksi tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang disajikan secara tahunan.</p> <p>Rencana pemenuhan modal inti minimum ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 9(b).</p>	<p>(ATMR), dan proyeksi rasio KPMM yang dijelaskan untuk posisi aktual (akhir bulan <u>Oktober</u> penyusunan RBB), proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan RBB, proyeksi 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran dan proyeksi tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.</p> <p>Proyeksi pemenuhan rasio KPMM dan rasio modal inti minimum mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR atau BPRS.</p> <p>Proyeksi pemenuhan KPMM ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 9(a).</p> <p>b. Rencana Pemenuhan Modal Inti Minimum</p> <p>Rencana pemenuhan modal inti minimum ditujukan bagi BPR yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan modal inti minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.</p> <p>Rencana pemenuhan modal inti minimum tersebut disajikan untuk posisi aktual (akhir bulan <u>Oktober</u> penyusunan RBB), proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan RBB, proyeksi 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran, serta proyeksi tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima yang disajikan secara tahunan.</p>

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p>c. Rencana Perubahan Modal</p> <p>Rencana perubahan modal merupakan proyeksi perubahan modal selama 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur permodalan maupun jumlah modal.</p> <p>Termasuk dalam rencana perubahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (<i>existing shareholders</i>), dan rencana penambahan modal lainnya. Rencana tersebut dijelaskan untuk posisi aktual (akhir bulan <u>September</u> penyusunan RBB), proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan RBB, proyeksi 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran dan proyeksi tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.</p> <p>Rencana perubahan modal ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 9(c).</p>	<p>Rencana pemenuhan modal inti minimum ini disajikan dengan mengacu pada Lampiran 9(b).</p> <p>c. Rencana Perubahan Modal</p> <p>Rencana perubahan modal merupakan proyeksi perubahan modal selama 3 (tiga) tahun mendatang baik terkait struktur permodalan maupun jumlah modal.</p> <p>Termasuk dalam rencana perubahan modal adalah rencana penambahan modal dari pemegang saham lama (<i>existing shareholders</i>), dan rencana penambahan modal lainnya. Rencana tersebut dijelaskan untuk posisi aktual (akhir bulan <u>Oktober</u> penyusunan RBB), proyeksi akhir bulan Desember pada tahun penyusunan RBB, proyeksi 1 tahun ke depan yang disajikan secara semesteran dan proyeksi tahun kedua dan ketiga yang disajikan secara tahunan.</p>
9	<p>Rencana Pengembangan Organisasi, Teknologi Informasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM)</p> <p>Pada bagian ini diuraikan informasi mengenai struktur organisasi dan jumlah SDM terkini, rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi dan SDM yang sedang berlangsung, maupun rencana pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan SDM lainnya paling kurang selama 1 (satu) tahun ke depan yang antara lain memuat:</p> <p>a. Rencana Pengembangan Organisasi</p> <p>Rencana pengembangan organisasi antara lain mencakup rencana</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p>pembentukan atau perubahan satuan kerja dan/atau komite, yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha BPR dengan mengacu pada ketentuan mengenai penerapan tata kelola dan manajemen risiko bagi BPR. Rencana pengembangan organisasi disajikan dengan mengacu pada Lampiran 10.</p> <p>b. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Rencana pengembangan teknologi informasi antara lain mencakup rencana pengembangan teknologi informasi yang mendukung sistem informasi manajemen dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya. Rencana pengembangan teknologi informasi disajikan dengan mengacu pada Lampiran 11.</p> <p>c. Rencana Pengembangan SDM Rencana pengembangan SDM antara lain mencakup pemenuhan SDM pada BPR, rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan SDM, termasuk rencana biaya/anggaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Rencana pengembangan SDM disajikan dengan mengacu pada Lampiran 12.</p> <p>d. Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya Alih daya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan/atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja. Rencana penggunaan tenaga kerja alih daya antara lain mencakup rencana penggunaan tenaga kerja di luar tenaga kerja tetap, yang meliputi jumlah maupun bidang kerja penugasan.</p>	<p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p> <p>Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU</p>

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Alih Daya disajikan dengan mengacu pada Lampiran 13.	
9	<p>Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru</p> <p>Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru yang wajib dicantumkan di Rencana Bisnis BPR paling sedikit meliputi rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang memerlukan persetujuan OJK dan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang harus dilaporkan kepada OJK.</p> <p>Pada bagian ini diuraikan mengenai rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru paling kurang untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.</p> <p>Rencana pelaksanaan kegiatan usaha baru yang wajib dicantumkan di Rencana Bisnis BPR adalah kegiatan usaha yang tidak pernah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan atau telah dilaksanakan sebelumnya oleh BPR yang bersangkutan, namun dilakukan pengembangan yang mengubah risiko tertentu atau seluruh risiko BPR yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor BPR berdasarkan modal inti.</p> <p>Rencana Pelaksanaan Kegiatan Usaha Baru disajikan dengan mengacu pada Lampiran 14.</p>	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU
10	<p>Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor</p> <p>Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana pemindahan alamat kantor pusat; rencana pembukaan, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor cabang dan/atau kantor kas; rencana kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, <i>payment point</i>, dan perangkat perbankan elektronik; rencana pemindahan <i>payment point</i> dan lokasi perangkat <i>Automatic</i> 	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p><i>Teller Machine dan/atau Automated Deposit Machine.</i></p> <p>Pengertian kantor cabang, kantor kas, dan kegiatan pelayanan kas berupa kas keliling, <i>payment point</i>, dan perangkat perbankan elektronik mengacu pada ketentuan mengenai BPR.</p> <p>Rencana tersebut disajikan untuk periode 1 (satu) tahun ke depan.</p> <p>Rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor disajikan dengan mengacu pada Lampiran 15.</p>	
11	<p>Informasi Lainnya</p> <p>Informasi lainnya paling sedikit meliputi informasi yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha BPR, namun belum disebutkan dalam cakupan Rencana Bisnis.</p> <p>Informasi lainnya meliputi hal-hal yang perlu diketahui atau dipantau oleh Otoritas Jasa Keuangan, mencakup antara lain langkah-langkah penyelesaian kredit bermasalah (termasuk dengan cara AYDA dan/atau hapus buku), penyelesaian AYDA dan hapus buku, serta laporan BPR sebagai Penyelenggara Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai).</p> <p>Pengertian agunan yang diambil alih (AYDA) mengacu pada pengertian AYDA yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset BPR.</p> <p>Informasi lainnya disajikan dengan mengacu pada Lampiran 16.</p>	Lihat Matriks Usulan Perbarindo Berdasarkan BPRKU
III. LAPORAN REALISASI DAN PENGAWASAN RENCANA BISNIS		
1	<p>Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Laporan Realisasi Rencana Bisnis wajib disampaikan BPR secara semesteran, yaitu posisi bulan Juni dan Desember. Laporan dimaksud paling sedikit mencakup:</p>	

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p>a. laporan Realisasi Rencana Bisnis yang paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) penjelasan mengenai pencapaian Rencana Bisnis meliputi fokus dan prioritas pencapaian Rencana Bisnis serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya; 2) penjelasan mengenai perbedaan atas realisasi Rencana Bisnis, seperti penyebab dan kendala yang dihadapi; dan 3) tindak lanjut atau upaya yang akan dilakukan untuk memperbaiki pencapaian realisasi Rencana Bisnis. <p>Penjelasan mengenai Realisasi Rencana Bisnis tersebut mencakup realisasi terhadap strategi bisnis dan kebijakan, proyeksi laporan keuangan, rencana pengumpulan dana, rencana penyaluran dana, dan rencana permodalan. Laporan Realisasi Rencana Bisnis disajikan dengan mengacu pada Lampiran 17(a).</p> <p>b. laporan realisasi rasio keuangan pokok dan pos-pos tertentu lainnya; Laporan realisasi rasio keuangan pokok dan pos-pos tertentu lainnya disajikan dengan mengacu pada Lampiran 17(b).</p> <p>c. informasi lainnya, berisi penjelasan mengenai realisasi hal-hal selain yang dijelaskan pada huruf a dan huruf b, antara lain meliputi laporan realisasi terhadap pengembangan organisasi, teknologi informasi, dan SDM, pelaksanaan kegiatan usaha baru, pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor.</p> <p>Laporan informasi lainnya disajikan dengan mengacu pada Lampiran 17(c).</p>	
2	<p>Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS, Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil</p>	

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p>pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Cakupan dalam laporan yang disusun Dewan Komisaris tersebut paling kurang meliputi penilaian mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif maupun kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis; b. faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPR secara umum, khususnya terkait dengan faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan likuiditas sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan BPR; c. penerapan tata kelola dan manajemen risiko; d. upaya memperbaiki kinerja BPR, dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas terjadi penurunan kinerja. <p>Penilaian Dewan Komisaris pada huruf a sampai dengan huruf d dapat dilengkapi pula dengan penilaian atas faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional BPR.</p> <p>Dalam kaitan dengan tugas Dewan Komisaris ini, BPR harus memiliki mekanisme internal dalam rangka penyusunan laporan tersebut di atas.</p> <p>Laporan Pengawasan Rencana Bisnis disajikan dengan mengacu pada Lampiran 18.</p>	
IV. JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN		
	<p>Mengacu pada Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS, BPR dinyatakan terlambat</p>	

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	<p>menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> BPR menyampaikan Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja; dan/atau BPR menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama <u>20 (dua puluh)</u> hari kerja. <p>BPR dinyatakan tidak menyampaikan Rencana Bisnis, penyesuaian Rencana Bisnis, Laporan Realisasi Rencana Bisnis, dan/atau Laporan Pengawasan Rencana Bisnis apabila sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan, BPR belum menyampaikan laporan dimaksud.</p>	<ol style="list-style-type: none"> BPR menyampaikan penyesuaian Rencana Bisnis setelah batas akhir waktu penyampaian sampai dengan paling lama <u>30 (tiga puluh)</u> hari kerja.
V. LAIN-LAIN		
	<p>Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan contoh untuk <u>menyusun Rencana Bisnis Tahun 2017</u>. Untuk penyusunan Rencana Bisnis periode berikutnya, pencantuman tahun hendaknya disesuaikan. Lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.</p>	<p>Lampiran dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan contoh untuk <u>menyusun Rencana Bisnis Tahun 2018</u>. Untuk penyusunan Rencana Bisnis periode berikutnya, pencantuman tahun hendaknya disesuaikan</p>
VI. PENUTUP		

POIN	ISI SURAT EDARAAN	USULAN PERBARINDO
	Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	